
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAMPU ADAT DESA KARANG BAJO KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Oleh

Vitri Millenia Tata Maisyani¹, Siluh Putu Damayanti² & Agusman³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Email : ¹tatamillenia@gmail.com, ²sp.damayanti@gmail.com,

³suganam90@gmail.com

Article History:

Received: 02-09-2022

Revised: 13-10-2022

Accepted: 28-10-2022

Keywords:

Community Participation,
Management.

Abstract: *The problems studied in this study are related to community participation in the management of the traditional village of Karang Bajo, Bayan District, North Lombok. The purpose of this study was to describe the participation of the community in Karang Bajo village in managing the traditional village. The research method used is descriptive qualitative with the research location in the traditional village of Karang Bajo village. Data collection techniques used in-depth interviews with observation techniques related to community participation. Data analysis techniques used are data reduction, presentation, data analysis, and drawing conclusions. Vertical participation is marked by the presence of outsiders who become leaders in involving the role of the community such as indecon from NGO, AMAN, KOMPAK, Rinjani Lodge, Institutions (STP Mataram, Unram, UIN Mataram, UGM) PT Bali Nusra and the local government. Horizontal participation is characterized by the role of the community in managing things or activities that are formed between the communities themselves in the form of mutual cooperation, deliberation and consensus and so on. Meanwhile, physical participation in Karang Bajo village refers to the form of the community's role in the form of objects that can be seen in the construction of traditional schools and the manufacture of art houses as olshops for community crafts. Non-physical participation found is community participation in the form of ideas or ideas in the management of Traditional Kampung in Karang Bajo village which can be seen in the ideas of a number of outside parties on vertical participation (partners) on tourism counseling, tourism management training, assistance in the preparation of tour packages and so on.*

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan poin penting di dalam suatu pembangunan baik

dalam skala desa, kabupaten, provinsi maupun sebuah negara. Dalam hal ini, Karang Bajo sebagai salah satu desa di kecamatan Bayan Lombok Utara memiliki keunikan sebagai destinasi wisata harus mengintegrasikan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dan lengkap agar prospek sebagai desa wisata dapat terwujud dengan maksimal. Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Sumarto, 2003). Namun demikian, penjelasan partisipasi masyarakat dari ahli tersebut menunjukkan fakta di Kampu Adat desa Karang Bajo masih terjadi kecemburuan sosial antarsesama masyarakat desa yang diakibatkan tidak meratanya pembangunan di setiap dusun sehingga dalam rapat desa sering terjadi selisih paham dan cenderung memaksakan pendapat masing-masing dalam mengelola desa.

Desa Karang Bajo memiliki potensi pariwisata budaya yang mampu membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung dengan ciri khas budaya yang dimilikinya. Potensi tersebut tampak pada ritual adat pada saat acara-acara tertentu setiap tahunnya seperti lebaran adat, maulid adat, dan kegiatan adat lainnya. Keunikan budaya yang ada di Kampu Adat desa Karang Bajo tersebut merupakan daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Pariwisata yang mencakup kehidupan masyarakat, kreasi seni dan budaya serta peninggalan sejarah harus terangkum dalam paket wisata agar wisatawan dapat menikmati sekaligus berwisata secara standar operasional yang berlaku. Semua bentuk-bentuk potensi tersebut dapat dimaksimalkan dalam bentuk desa wisata yang berstandar jika di dalam prosesnya mengintegrasikan partisipasi masyarakat secara komprehensif. Kampu Adat desa Karang Bajo masih dapat dikatakan lemah dalam pengelolaan potensi budayanya. Hal tersebut dikarenakan peran masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam memanfaatkan banyaknya kunjungan wisatawan seperti menyediakan penginapan, paket *tour* dan sebagainya yang akan berimplikasi kepada perubahan ekonomi masyarakat. Adanya bentuk partisipasi masyarakat secara khusus dalam mengelola Kampu Adat sebagai destinasi wisata akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat sekitar akan berkembang dengan adanya kegiatan pariwisata melalui perencanaan serta mengikutlibatkan peran masyarakat secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pengelolaan suatu objek wisata perlu melibatkan partisipasi dari masyarakat sekitar. Masyarakat diharapkan berpartisipasi secara aktif baik dalam hal pengelolaan maupun perencanaan pengembangan kawasan wisata. Selain itu, keadaan dilapangan berbeda karena terdapat sejumlah masyarakat yang merasa waktu bekerja mereka dihalangi oleh adanya kegiatan pariwisata. Masyarakat belum menyadari bahwa pariwisata dapat menjadi sumber mata pencaharian dan meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata.

Pengelolaan Kampu Adat desa Karang Bajo sebagai desa wisata budaya membutuhkan partisipasi dari masyarakatnya sendiri berupa masyarakat desa Karang Bajo sendiri yang mengelola desanya sebagai desa wisata. Hal ini bisa disandingkan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa a) masyarakat memperoleh kesempatan pemenuhan kebutuhan pariwisata, b) melakukan usaha pariwisata, c) menjadi pekerja/buruh pariwisata, dan/atau, d) berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Oleh karena itu, pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kampu Adat desa Karang Bajo

kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara. Dengan demikian, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini ialah bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat desa Karang Bajo dalam pengelolaan Kampu Adat di kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara yang bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat desa Karang Bajo dalam pengelolaan Kampu Adat kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara.

LANDASAN TEORI

Penelitian sumber-sumber pustaka lainnya memiliki banyak manfaat bagi penelitian yang akan dilakukan. Berikut pemaparan dari sejumlah penelitian relevan tersebut. Penelitian pertama oleh Khairunnisa (2021) yang meneliti tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam “Pengembangan Ekowisata Kerujuk Berbasis Masyarakat di Desa Menggala Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat termasuk di kategori rendah karena keterlibatan masyarakat masih kurang di seluruh tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pengembangan ekowisata kerujuk.

Penelitian kedua oleh Salmah (2021) yang meneliti tentang “Model Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Ekowisata Mangrove di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah banyak yang berpartisipasi dalam ekowisata mangrove di desa Lembar Selatan dengan membuka usaha kuliner (makanan khas Sasak), menyewakan sampan/perahu untuk mengelilingi lokasi mangrove, jasa parkir yang melibatkan masyarakat khususnya anak muda, menjual dan memeriksa tiket masuk.

Penelitian ketiga oleh Salmah (2021) yang meneliti tentang “Analisis Pengembangan Agrowisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak terlalu besar partisipasinya dalam perencanaan dan pengawasan. Masyarakat berpartisipasi dalam implementasi dengan menyediakan *home stay/bungalow* yang sering disewa oleh para turis asing.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini memiliki sisi perbedaan dan persamaan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dan sama-sama mengambil subjek masyarakat sekitar tempat wisata, yaitu wilayah Lombok Utara. Sementara itu, perbedaan pada penelitian ini penelitian pertama dan kedua mengkaji partisipasi masyarakat dari aspek ekowisata, dan penelitian ketiga dari aspek agrowisata. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kampu Adat desa Karang Bajo kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara. Partisipasi masyarakat dipilih untuk merumuskan pengelolaan secara konseptual sehingga dapat diaplikasikan dalam pengelolaan Kampu Adat sebagai destinasi andalan di pulau Lombok Provinsi NTB.

Partisipasi masyarakat menurut Zamroni (2011:51) mengatakan bahwa partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat, tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Dewi, dk: 2013). Adisasmita dalam Wahyuddin (2018) menyebutkan partisipasi adalah peran serta dan keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana dan program pembangunan yang dibutuhkan

masyarakat setempat, implementasi dan pemantauan serta pengawasannya. Mulyadi (2009:13) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut.

Bentuk partisipasi menurut Effendi (dalam Astuti, 2011: 58) terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien dan partisipasi horizontal yang masyarakat mempunyai prakarsa setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Sementara itu, Basrowi (dalam Dwiningrum, 2015:58-59) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu partisipasi secara fisik dan nonfisik. Sementara itu, partisipasi masyarakat bisa dilihat dari bentuk: partisipasi dalam bentuk pikiran, ide atau gagasan, tenaga, bentuk pikiran, keahlian, barang, dan dalam bentuk barang. Selain itu, beberapa ahli lain menjelaskan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sugiyah, 2010; Sumaryadi, 2010).

Yuwono (2016) membedakan partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaannya, sebagai berikut: partisipasi spontan, partisipasi terinduksi, partisipasi tertekan oleh sosial, ekonomi dan peraturan. Rohman (2009:46) mengartikan partisipasi sendiri sebagai keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Tingkatan atau tahapan partisipasi menurut Arnstein sebagaimana yang dikutip Wicaksono (2010) mengemukakan adanya 8 tingkatan berdasarkan kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan dalam pembangunan memaparkan beberapa karakteristik yang terdapat pada tingkatan partisipasi, yaitu manipulasi, terapi, pemberitahuan, konsultasi, penentraman, kemitraan, pendelegasian, dan kontrol. Tingkat manipulasi dan terapi dianggap bukan partisipasi karena pemegang kekuasaan hanya sekedar mendidik dan mengobati. Pada tingkat ketiga yaitu pemberitahuan, konsultasi, dan penentraman dianggap sebagai kategori *tokenisme* yaitu masyarakat didengar akan pendapatnya akan tetapi masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Apabila partisipasi masyarakat hanya sampai pada tokenisme maka kecil kemungkinan ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Sementara itu, dalam partisipasi masyarakat terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut: 1) faktor internal, yaitu menurut Slamet (2003:137-143) faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah penghasilan; 2) faktor eksternal menurut Sunarti (2003:9) dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam pengelolaan pariwisata adalah pemilik pariwisata, kelompok masyarakat, dan pemerintah.

Fungsi pengelolaan antara lain *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (menggerakkan), dan *Controlling* (pengawasan). Sementara itu, menurut Sunaryo (2013:77) perkembangan pariwisata di suatu daerah dan

kemungkinan terjadinya dampak baik positif maupun negatif yang selalu menjadi bagian dari proses perubahan, pada dasarnya sangat bergantung pada manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh segenap pemangku kepentingan (*stake holders*) baik dari unsur pemerintah industri-masyarakat yang ada di suatu destinasi. Pitana (2009:81) menjelaskan bahwa pengelolaan pariwisata haruslah menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Pandangan Cox sebagaimana yang dipaparkan Pitana (2009) menjelaskan pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan, (2) preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata, (3) pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal, (4) pelayanan kepada wisatawan yang berbasis kepada keunikan budaya dan lingkungan lokal.

Damardjati dalam Pambudi (2010:121) wisata budaya adalah gerak atau kegiatan wisata yang dirangsang oleh adanya objek-objek wisata berwujud hasil-hasil seni budaya setempat, seperti adat istiadat, upacara-upacara, agama, tata hidup masyarakat setempat, peninggalan-peninggalan sejarah, hasil-hasil seni, kerajinan rakyat dan lain sebagainya. Pendit dalam Sari (2010:38) wisata budaya adalah perjalanan yang bertujuan mempelajari objek-objek yang berwujud kebiasaan rakyat, adat istiadat, tata cara hidup, budaya dan seni atau kegiatan yang bermotif sejarah. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 dijelaskan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Maryani (dalam Kirom, 2016:537) memaparkan bahwa suatu daya tarik wisata harus memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, syarat-syarat tersebut, meliputi (1) *What to see*, yaitu di tempat tersebut harus ada objek dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. *What to see* meliputi pemandangan alam, kegiatan, kesenian dan atraksi wisata; (2) *What to do*, yaitu di tempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama ditempat itu; (3) *What to buy*, yaitu tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk di bawa pulang ke tempat asal; (4) *What to arrived*, yaitu di dalamnya termasuk aksesibilitas, bagaimana kita mengunjungi daya tarik wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan dan berapa lama tiba ketempat tujuan wisata tersebut; (5) *What to stay*, yaitu bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara selama berlibur.

Kampu Adat merupakan sebutan lain bagi induk desa kampung adat yang terdapat di pusat desa Karang Bajo kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara. Selain itu, kampu adat adalah induk kampung yang merupakan peninggalan bersejarah dan dimanfaatkan sebagai pusat pelaksanaan kegiatan-kegiatan budaya di Desa Karang Bajo. Kampu Adat memiliki keunikan dari segi arsitektur bangunannya yang berbahan dasar kayu, dinding bangunan dari pagar bambu dan atapnya dari alang-alang. Arsitektur bangunan Kampu Adat dapat dilihat dari bangunan yang masih alami dengan bahan menggunakan kayu dan bambu. Dalam wisata budaya menurut Octaviani & Komalasari (2017:153) menunjukkan bahwa

produk-produk seni budaya dan kesejarahan baik dalam bentuk atraksi fisik dan apresiasi masyarakat seperti artefak bangunan bersejarah, artefak sejarah kejadian alam dan kehidupan makhluk, apresiasi seni dan budaya, adat budaya serta bahasa. Seperti halnya dalam konsep pengembangan pariwisata budaya suatu peninggalan atau *heritage* yang dijabarkan sebagai konsep luas bersifat *tangible asset* seperti Kampu Adat di desa Karang Bajo dan situs-situs lain yang bersifat *intangible* beserta praktik-praktik budaya, pengetahuan dan pengalaman hidup menjadi aset yang dapat dikonservasi dan sebagai unsur yang dapat dijadikan sebagai nilai eksentif dalam atraksi wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kampu Adat desa Karang Bajo, kecamatan Bayan, kabupaten Lombok Utara. Waktu tempuh dari Lombok *International Airport* dengan Kota Mataram adalah 1 jam. Dari pusat Kota Mataram menuju lokasi Karang Bajo-Kampu Adat membutuhkan waktu tempuh 2 jam 30 menit. Pemilihan Kampu Adat sebagai lokasi objek penelitian dilakukan karena memiliki berbagai macam atraksi budaya (ritual-ritual adat) seperti tradisi maulid adat, lebaran adat, tradisi sidekah turun ton, tarian gegerak tandak, gendang gerantung serta kerajinan tangan lainnya. Selain itu, lokasi penelitian ini dipilih karena partisipasi masyarakat masih rendah. Hal itu bisa dilihat dari keadaan faktual di lapangan berupa masyarakat kurang berpartisipasi misalnya tidak menyediakan penginapan, kecemburuan sosial, tidak tersedianya paket *tour* dan masih terdapat sejumlah masyarakat yang merasa waktu bekerja mereka dihalangi oleh adanya kegiatan pariwisata. Dengan demikian, hal tersebut merupakan alasan dipilihnya menjadi lokasi penelitian untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam yang disertai dengan teknik observasi serta teknik dokumentasi jika dibutuhkan. Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab langsung antara peneliti dengan informan secara mendalam tentang topik yang diangkat dalam penelitian. Data yang dikumpulkan melalui wawancara adalah data yang berwujud narasi (deskripsi) mengenai partisipasi masyarakat di Kampu Adat desa Karang Bajo dalam pengelolaan potensi wisata budaya di Kampu Adat dengan teknik lanjutan/lesapan berupa rekaman. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat setiap gejala atau fenomena. Teknik observasi ini dilakukan ke lokasi penelitian yaitu mengunjungi objek wisata seperti penduduk setempat. Dengan demikian, teknik observasi merupakan teknik yang dilakukan untuk memperkuat hasil dari wawancara untuk membuktikan kebenaran dan memperkuat hasil wawancara. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa gambar atau rekaman kegiatan. Dengan demikian, teknik dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan untuk memperkuat hasil dari wawancara dan observasi untuk membuktikan kebenaran dan memperkuat hasil pengumpulan data.

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2011) *purposive sampling* adalah teknik penentu informan dengan pertimbangan pada kemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada peneliti. Berdasarkan Strauss dan Corbin (dalam Harahap, 2020) kriteria penentuan informan adalah

sebagai berikut: (a) peserta aktif dalam kelompok, organisasi, atau budaya yang diteliti, (b) mengetahui informasi secara menyeluruh tentang Kampu Adat desa Karang Bajo, (c) informan yang tinggal di sekitar Kampu Adat desa Karang Bajo, (d) terlibat dalam pengelolaan warisan potensi wisata yang diteliti, (e) penduduk asli Kampu Adat Karang Bajo. Sugiyono (2017:335) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan merencanakan secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah reduksi data yaitu merangkum memilih dan memfokuskan hal-hal yang penting kemudian dicari tema dan polanya. Penyajian data (*display data*) untuk analisis data dilakukan dengan membangun kembali data yang telah direduksi dan disajikan dalam bentuk teks naratif dengan tujuan agar data yang telah diorganisasikan dapat disusun selaras dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data menggunakan deksriptif, yaitu dengan menjelaskan atau menjabarkan fenomena-fenomena terkait dengan data penelitian yang dihubungkan dengan teori. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut pemaparan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kampu Adat di desa Karang Bajo kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara.

a. Partisipasi Vertikal

Berdasarkan hasil temuan data mengenai partisipasi vertikal di desa Karang Bajo, dapat dijelaskan desa tersebut telah banyak dilirik oleh pihak luar dari sisi partisipasi vertikal. Adanya pihak luar yang menjadi bagian dalam partisipasi vertikal menunjukkan bahwa hal tersebut sesuai dengan konsep partisipasi yang merujuk kepada suatu konteks tertentu yang mana masyarakat berperan dalam berbagai program yang digagas oleh pihak lain sebagaimana pernyataan Effendi (dalam Astuti, 2011: 58).

Keterlibatan indecon (*Indonesian Ecotourism Network*) dari NGO (*Non-governmental Organization*), KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) dan AMAN (Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara) dan *Rinjani Lodge* menunjukkan peran serta masyarakat dalam program yang dicanangkan cukup baik. Sebagaimana yang dituturkan narasumber, semua program yang dicanangkan pihak tersebut sangat antusias diikuti oleh masyarakat dan masyarakat menyambut baik dan terbuka untuk diikutlibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Hal tersebut bisa dilihat pada kegiatan pelatihan penyusunan paket wisata, penyusunan dan penataan tata ruang desa dalam prospek desa wisata dan sebagainya.

Selain itu, partisipasi vertikal yang ditemukan di desa Karang Bajo ialah adanya kegiatan KKN sejumlah kampus dengan berbagai program perencanaan dan pengembangan desa. Misalnya, KKN STP Mataram yang hadir dengan membawa program pariwisata berbasis desa wisata melalui pelatihan kepada masyarakat untuk menyusun paket wisata, dokumentasi wisata, dan manajemen pariwisata dengan tujuan agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai kepariwisataan. Selain itu, KKN Universitas Mataram membentuk sanggar tari *Selemor Ate* untuk mengembangkan sekaligus melestarikan tarian-tarian daerah khas desa serta pelatihan menenun. Selain itu, peran masyarakat dalam bentuk partisipasi vertikal ini sangat tinggi karena masyarakat merasa tertarik dan terbantu dengan program-program pihak luar yang diberikan.

b. Partisipasi Horizontal

Partisipasi horizontal merujuk kepada kegiatan masyarakat yang mempunyai prakarsa setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya sebagaimana pernyataan Efendi (dalam Astuti, 2011: 58). Hal tersebut jika dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di desa Karang Bajo maka terdapat kesesuaian. Kesesuaian tersebut ialah pada saat adanya suatu kegiatan di desa Karang Bajo masyarakat terlibat secara penuh dalam pelaksanaannya. Misalnya saat kegiatan pelaksanaan lebaran adat masyarakat tanpa adanya arahan akan berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk kerja sama atau berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Aspek kerja sama dan koordinasi satu dengan yang lain itulah yang merujuk kepada konsep partisipasi horizontal tersebut.

c. Partisipasi Fisik

Partisipasi fisik dalam konteks ini dijelaskan sebagai bentuk partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan yang lain sebagaimana pernyataan Basrowi (dalam Dwiningrum, 2015:58-59). Partisipasi fisik tersebut dapat dilihat pada penyediaan sekolah adat oleh PU Bali Nusra yang bertujuan untuk memberikan wahana kepada masyarakat dalam melestarikan berbagai budaya-budaya daerah kepada generasi muda melalui sekolah berbasis adat. Selain itu, terdapat juga bale Tenun yang dijadikan sebagai *olshop* hasil kerajinan tangan berupa kain tenun, anyaman dan sebagainya yang bisa dijual kepada wisatawan sebagai cenderamata khas daerah Karang Bajo. PU Bali Nusra dan Disprindag memberikan partisipasi fisik berupa pengadaan gedung atau fasilitas yang mana fasilitas tersebut dibangun oleh masyarakat dengan dinas dan PU Bali Nusra sebagai donator. Sementara dari sisi partisipasi fisik selain bangunan, masyarakat menerima dalam bentuk yang lain dengan baik asalkan partisipasi tersebut sesuai dengan aturan ada yang berlaku di wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat setempat juga menunjukkan partisipasi fisik dalam bentuk barang, yaitu uang yang dicanangkan secara bersama-sama. Hal tersebut tampak pada setiap kegiatan pemeliharaan sejumlah bangunan seperti rumah tenun dan sebagainya.

d. Partisipasi Nonfisik

Partisipasi nonfisik merujuk kepada pelibatan masyarakat dalam bentuk selain benda bisa berupa pikiran/gagasan, sikap, tenaga atau tindakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Basrowi (dalam Dwiningrum, 2015:58-59) dan Davis (dalam Ibori, 2013:4). Hal tersebut menunjukkan kesesuaian di lapangan bahwa desa Karang Bajo memiliki banyak bentuk partisipasi nonfisik. Partisipasi nonfisik yang bisa dijelaskan berdasarkan hasil temuan di desa Karang Bajo ialah adanya sejumlah program yang berikan oleh pihak luar seperti yang tertera pada partisipasi vertikal di atas. Misalnya KKN Mahasiswa STP Mataram yang memberikan partisipasi pemikiran mengenai cara promosi wisata dan penyusunan paket wisata. Namun demikian, berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh narasumber bernama Hamdi, S.Pd selaku kepala desa Karang Bajo (Kamis, 17 Maret 2022) menuturkan bahwa ada beberapa masyarakat desa Karang Bajo yang lulusan sarjana, baik sarjana pariwisata maupun sarjana dengan jurusan lain. Namun, sejauh ini belum ada berkontribusi memberikan ide/gagasan untuk program Kampu Adat.

Penjelasan mengenai partisipasi masyarakat di atas dari sisi tingkatan partisipasi bergerak pada hirarki 3 sampai dengan 8. Sebagaimana penjelasan bahwa tingkat ketiga

yaitu pemberitahuan, konsultasi, dan penentruman dianggap sebagai kategori *tokenisme* yaitu masyarakat didengar akan pendapatnya akan tetapi masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Apabila partisipasi masyarakat hanya sampai pada tokenisme maka kecil kemungkinan ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Tingkatan 3 sampai 8 dari hirarki partisipasi berdasarkan hasil analisis di atas ialah pemberitahuan, konsultasi, penentruman, kemitraan dan kontrol.

Hirarki partisipasi yang berada pada tingkat *pemberitahuan dan konsultasi* ditunjukkan adanya partisipasi vertikal berupa pihak luar yang memberitahukan tentang suatu mekanisme pengelolaan, konsep, perencanaan dalam pengembangan desa wisata seperti program mahasiswa KKN dan sejumlah organisasi di luar pemerintahan. Sementara itu, dari tingkatan *penentruman* ditunjukkan oleh berbagai hasil dari program yang digalakkan oleh pihak lain sehingga desa Karang Bajo secara perlahan menunjukkan ketentraman dan keseimbangan kehidupan. Hal tersebut jelas tampak pada jenis bangunan dan berbagai hal-hal yang bersifat membudaya masih terjaga dan dilestarikan dengan baik. Dari sisi hirarki partisipasi *mitra* ditunjukkan dengan adanya pihak luar yang melakukan mitra. Misalnya, desa Karang Bajo bermitra dengan *Rinjani Lodge* dalam menggagas suatu kegiatan kebudayaan yang ditujukan untuk pariwisata. Selain itu, mahasiswa KKN melakukan mitra dalam menggagas tarian daerah yang dibentuk melalui sanggar *selemor ate* yang diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata. Hirarki partisipasi terakhir yaitu *kontrol* ditunjukkan oleh berbagai program dari partisipasi yang ada. Segala bentuk program yang mengikutlibatkan peran masyarakat bertujuan untuk memberikan kontrol kepada segenap masyarakat dan seluruh sistem yang ada sehingga segala bentuk kehidupan masih tertata dengan baik. Selain itu, dapat dilihat pada partisipasi fisik berupa adanya pihak luar yang memberikan dana untuk membangun sekolah adat sebagai tempat pewarisan dan pelestarian adat segala kebudayaan di desa Karang Bajo dan sebagainya.

Keberlangsungan partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu masyarakat di lapangan tidak harus melihat umur, pendidikan atau faktor ekonomi dalam berpartisipasi di berbagai kegiatan desa dan dari sisi faktor eksternal menunjukkan kesesuaian karena berbagai pihak yang berpartisipasi dalam bentuk vertikal merupakan *stakeholder* dalam konteks pariwisata sehingga memberikan sumbangsih yang baik bagi masyarakat desa Karang Bajo dalam mengembangkan desa ke sektor pariwisata dalam bentuk pelatihan paket wisata, promosi wisata dan sebagainya (Slamet, 2003:137-143).

Pandangan Cox sebagaimana yang dipaparkan Pitana (2009) menjelaskan pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip. Prinsip yang tampak pada pengelolaan Kampu Adat yaitu: *pertama*, pembangunan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal telah ditunjukkan di lapangan berupa segala bentuk pembangunan dan pengembangan masih bertahan sesuai dengan budaya asli. *Kedua*, preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata pada konteks di lapangan menunjukkan kesesuaian dari sisi konsep, namun dari sisi hasil masih belum maksimal dan perlu digalakkan kembali secara intens dan komprehensif. *Ketiga*, pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal. Hal ini bisa tampak pada tindakan membentuk sanggar *selemor ate* yang bergerak dalam menunjukkan tarian daerah untuk ajang festival atau keperluan pariwisata. *Terakhir* yaitu pelayanan kepada wisatawan yang berbasis kepada keunikan budaya dan lingkungan lokal.

Prinsip terakhir ini merupakan prinsip yang masih cukup rendah. Desa Karang Bajo dari sisi konsep wisata budaya telah menunjukkan kesesuaian karena memiliki berbagai macam keunikan atau kearifan budaya setempat. Hal ini sesuai dengan pernyataan mengenai pariwisata berbasis kebudayaan (Pambudi, 2010:121; Sari, 2010:38). Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan berupa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kampung Adat di desa Bayan Lombok Utara dengan penelitian yang pernah dilakukan seputar partisipasi masyarakat di daerah Lombok Utara (Khairunnisa, 2021; Salmah, 2021)

PENUTUP

Kesimpulan

Partisipasi vertikal yang terdapat di desa Karang Bajo tampak pada pihak luar seperti indecon (*Indonesia Ecotourism Network*) yang merupakan salah satu bagian dari NGO (*Non-Governmental Organization*), AMAN (Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara), KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi), mahasiswa KKN dan pihak lainnya yang memberikan program dalam konteks pariwisata atau di luar pariwisata. Partisipasi horizontal tampak pada peran serta masyarakat dalam bentuk kerja sama atau gotong royong dalam melakukan program baik dalam konsep pariwisata maupun di luar pariwisata. Partisipasi fisik dapat dilihat dari adanya peran serta masyarakat dalam membangun atau pengadaan sejumlah bangunan berupa sekolah adat dan bale tenun yang dibangun bersama secara gotong royong. Partisipasi nonfisik dapat dilihat pada sejumlah gagasan atau ide yang dimuat dalam berbagai program dari sejumlah pihak luar desa.

Saran

Saran yang dapat diberikan atas dasar penelitian ini ialah agar akademisi memfokuskan dan menjadikan desa Karang Bajo sebagai objek kajian dari sisi ilmu kepariwisataan agar Kampung Adat dapat dijadikan sebagai destinasi unggulan dalam konteks pariwisata budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Anwar, M., & Shafira, M. (2020). Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 266–287. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.156>.
- [2] Dwiningrum, S.I.A. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Fandeli, Dewi, M. H., C., & M, Baiquni. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih. *Kawistara*, 3, 131. [10 Juli 2017].
- [4] Harahap, Nursapia. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing.
- [5] Ibori, Antonius. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di desa Tembuni Distri Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*.
- [6] Idrus, S, dkk. (2018). Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Kabupaten Lombok Utara. *Undhira Bali*, November, 657–662.
- [7] Khaerunnisa, dkk. 2021. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata Kerujuk Berbasis Masyarakat di Desa Menggala Kecamatan Pemenang

- Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Agrimensio. Vol 22 no 2/
<https://doi.org/10.29303/agrimansion.v22i2.510>
- [8] Kirom, dkk. 2016. Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Wisata Budaya dan Pengaruhnya terhadap Kepuasan Wisatawan. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, & Pengembangan. Universitas Negeri Malang. Volume: 1 Nomor: 3 Bulan Maret Tahun 2016 Halaman: 536—546.
- [9] M, Astuti. 2011. Analisa Keuntungan Sistem Pertanian Terpadu Berbasis Holtikultura pada Kelompok Tani Bumi Harapan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agama [Skripsi]. Padang: Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- [10] Mulyadi. 2009. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: STIE YPKPN.
- [11] Octaviani, L. K., & Komalasari, S. A. (2017). Kain Tenun Ikat Sebagai Wisata Budaya Kabupaten Sikka. Jurnal Ilmiah, 14 (3), 151-159. <http://ejournal.stipram.ac.id/index.php/kepariwisataan/article/download/60/53>
- [12] Pambudi, I.S. 2010. Program Kerja Benteng Vredeburg dalam meningkatkan Wisatawan. Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Surakarta.
- [13] Pitana, I G. dan Diarta, S. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [14] Puspawardani, Wida. 2017. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 4 No.1/2017.
- [15] Rohman, Ainun dkk. 2009. Politik, Partisipasi, dan Demokrasi dalam Pembangunan. Malang: Averroes Press.
- [16] Salmah, Emi. dkk. 2021. Analisis Pengembangan Agrowisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Journal of Economics and Business, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.66>.
- [17] Salmah, Emi, dkk. 2021. Model Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Ekowisata Mangrove di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Journal of Economics and Business, 7(2), 223–238. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i2.78>.
- [18] Sapti, M. (2019). Daya tarik wisata jumprit di kabupaten tumanggung berdampak pada minat kunjungan wisatawan. Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi), 53(9), 1689–1699. <http://stiepari.greenfrogs.co.id/jurnal/index.php/JT/article/download/162/164>
- [19] Sari, Okiana Nur Indah. 2010. Potensi dan Pengembangan Museum Wayang Indonesia Sebagai Objek Wisata Budaya di Kabupaten Wonogiri. Fak. Sastra dan Seni Rupa. D III Usaha Perjalanan Wisata. Surakarta.
- [20] Slamet. 2003. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- [21] Sugiyah. 2010. Partisipasi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates,. Tesis. PPs UNY. Kabupaten Kulon Progo
- [22] Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B. Bandung: Alfabeta.
- [23] Sugiyono 2017. Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta.
- [24] Sumarto dan Hetifa Sj. 2003. Inovasi Partisipasi dan Good Governance. Bandung:

Yayasan Obor Indonesia.

- [25] Sumaryadi, I Nyoman. (2010). Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.
- [26] Sunarti. 2003. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.
- [27] Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Yogyakarta: Gava Media.
- [28] Undang Undang tentang Kepariwisataaan, UU No. 10 Tahun 2009. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan HAM.
- [29] Wahyuddin. (2018). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. 1-102.
- [30] Wicaksono, M.A.2010. Analisis Tingkat Partisipasi Warga dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. Skripsi. Tidak Diterbitkan.
- [31] Yuwono. 2016. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Badan Penerbit Unversitas diponegoro. Semarang.
- [32] Zamroni, 2011. Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.